BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia sebagai anggota The Group of Twenty(G20 Forum)bersepakat untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS(www.iaiglobal.or.id, 2010). International Financial Reporting Standart (IFRS) adalah suatu upaya untuk memperkuat pondasi keuangan global dan mencari solusi jangka panjang mengenai transparasi laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonefsia (IAI) dalam Gamayuni (2009), merencanakan bahwa standar akuntansi international (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan. Pada tahun 2012 bahwa Standar akuntansi keuangan berbasis IFRSdi Indonesia secara keseluruhan atau *fulladoption*.

Perusahaan yang menerapkan standar akuntansi keuangan Berbasis IFRS maka diwajibkan untuk melakukan pengungkapan penuh (*full Disclosure*). Menurut (Haryono, 2010), Pengungkapan penuh (*full disclosure*) merupakan salah satu prinsip akuntansi dimana tidak hanya menampilkan hal-hal yang baik saja dan menyingkirkan bagian yang merugikan. Salah satu isu penting dipasar modal adalah pengungkapan dalam *annual report*. Menurut (Lynch, 2000), laporan laba rugi adalah bagian terpenting dari *annual report* yang dilihat *stakeholders* sebagai bahan pengambilan keputusannya karena dapat menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode.

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 31 tentang perbankan revisi tahun 2000, PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, dan Surat Edaran Ketua Bapepam (P3LKEPPBANK 2008) menyatakan bahwa bank wajib mengungkapan informasi mengenai risiko umum yang dihadapi. Jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur dan perusahaan lainnya, industry perbankan lebih banyak menjalankan aktivitas operasinya berhubungan dengan risiko. Menurut (Suhardjanto dkk, 2012), Corporate governance diperlukan agar pengungkapan dalam *annual report* mencukupi kebutuhan informasi bagi stakeholders dan sesuai dengan peraturan yang ada. Definisi dari *corporate Governance* ialah sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan (pemegang saham/ pemilik modal, Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2012).

Di Indonesia, kasus bank bermasalah karena pratik perbankan yang tidak sehat dengan mengesampingkan penerapan prinsip *corporate governance* (http://grundelanbankcentury.wordpress.com2010). Kasus kredit macet yang menyebabkan likuidasi Bank Summa pada tahun 1992 menjadi salah satu potret kelam industry perbankan Indonesia. Penyebab utama maraknya kasus bank bermasalah yang terjadi di Indonesia karena kurangnya transparasi yang dilakukan pihak manajemen bank kepada stakeholder. Selain itu, tugas dan tanggung jawab dewan komisaris selaku pengawas pelaksanaan *corporate governance* pada

perbankan belum dilaksanakan dengan baik (http://www.tempointeraktif.com 2009).

Ada beberapa kasus ketidakpatuhan dalam pengungkapan wajib yang pernah terjadi pada industry perbankan di Indonesia. Kasus Bank Lippo menjadi salah satu contoh keengganan perbankan mengungkapkan besarnya laba sesungguhnya yang diperoleh perusahaan. Dimana Bank Lippo diketahui mengeluarkan tiga laporan keuangan yang berbeda, yaitu yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002, yang disampaikan ke BEI pada tanggal 27 Desember 2002, dan disampaikan ke manajemen Bank Lippo pada januari 2003(http://www.suaramerdeka.com,2003).

Selain itu, ada beberapa kasus lain yang terjadi pada perbankan di Indonesia yaitu kasus L/C *(letter of credit)* fiktif Bank BNI tahun 2003, kasus pembekuan usaha Bank Global tahun 2004, kasus Bank Century tahun 2008, kasus pembobolan dana nasabah Citibank dan Bank Mega pada tahun 2011, dan masih banyak kasus bank bermasalah yang membuktikan kurangnya penerapan prinsip *corporate governance* pada perbankan di Indonesia.

Penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS di luar negeri sudah banyak dilakukan oleh beberapa orang, antara lain oleh Al-Akra et al.,(2010) di yordania. Sementara itu di Indonesia penelitian yang pernah dilakukan oleh Prawinandi dkk, (2012), Utami dkk, (2012) , Pitasari (2014), Widjayanti (2015) dan Hafiz dkk, (2015).

Penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS memunculkan hasil yang beragam. Penelitian Al-Akra et al., (2010) menunjukan bahwa jumlah

anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. Temuan berbeda dihasilkan dalam penelitian Prawinandi dkk, (2012) dimana jumlah anggota dewan komsaris dan jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Penelitian Widjayanti (2015) menunjukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Namun penelitian Utami dkk, (2012) menunjukan temuan yang berbeda dimana hasil penelitiannya membuktikan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Hasil penelitian Pitasari (2014) menunjukan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hafiz dkk, (2015) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh negative terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Dari berbagai penelitian diatas yang memunculkan beragam hasil penelitian mendorong peneliti untuk mereplikasi penelitian sejenis mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehenshif. Replikasi penelitian ini menggunakan jurnal acuan dari penelitian yang dilakukan

olehHafiz dkk, (2015). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib *konvergensi IFRS* pada laporan laba rugi komprehenshif. Selain itu, Peneliti juga menambahkan *leverage dan profitabilitas* sebagai variabel kontrol.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib *konvergensi IFRS* pada laporan laba rugi komprehenshif serta mendorong perusahaan perbankan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergensi IFRS dalam penyusunan laporan keuangan dengan lebih baik lagi sehingga tanggung jawabnya kepada stakeholders dapat terpenuhi dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan regulasi dan kepentingan sekelompok stakeholders.

1.2. Rumusan Masalah

Telah dinyatakan bahwa Semua perusahaan go public dan multinational di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergensIFRS dalam penyusunan laporan keuangan pada atau mulai tanggal 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2009). Permasalahan akan muncul apabila suatu perusahaan belum mampu menerapkan standar akuntansi yang konvergensi dengan IFRS.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1.1.1. Apakah Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IFRS*?

1.1.2. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IFRS*?

1.1.3. Apakah Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IFRS*?

1.1.4. Apakah Jumlah Anggota Komite Audit berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IFRS*?

1.1.5. Apakah Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IFRS*?

1.3.Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah hendak mengungkap sejauhmana pengaruh struktur *corporate governance* yang didalam penelitian ini diproksikan oleh jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehenshif. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IF*RS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif.
2. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IFRS* pada Laporan Laba Rugi Komprehensif.

3. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IFRS* pada Laporan Laba Rugi Komprehensif.
4. Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IFRS* pada Laporan Laba Rugi Komprehensif.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu dan wawasan mengenai pengungkapan wajib terhadap item-item yang dipersyaratkan dalam PSAK adopsi IFRS.
   b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perbankan agar mengetahui tingkat kepatuhan pengungkapan wajib sesuai PSAK adopsi IFRS
   b. Peneltian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemakai laporan keuangan mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan tujuan untuk memprediksi kepatuhan perusahaan dalam pengungkapan wajib.